



Strategi Diplomasi Ekonomi Indonesia dalam Meningkatkan Investasi Asing di Sektor Industri pada Masa Pemulihan Ekonomi 2021–2024

Almadio Fissaura Ramdhana

Hasna Wijayati

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Slamet Riyadi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Slamet Riyadi

Email Korespondensi: almafissa@gmail.com



Abstract

This study analyzes Indonesia's economic diplomacy strategy in strengthening the attractiveness of foreign investment in the industrial sector during the 2021–2024 economic recovery. It uses descriptive qualitative document analysis. Data were collected from reports by the Ministry of Investment and Downstreaming/BKPM, the Ministry of Foreign Affairs, international organizations, and scholarly literature. The findings show that economic diplomacy was pursued through multilateral forums, bilateral and regional economic cooperation, investment promotion, and interagency coordination. Realized investment in manufacturing increased from IDR 325.4 trillion in 2021 to IDR 721.3 trillion in 2024, while foreign direct investment reached IDR 900.2 trillion in 2024. Economic diplomacy supported confidence and investment opportunities, but it was not the sole determinant of investment realization. Downstreaming, regulatory certainty, infrastructure, land readiness, and global economic conditions also shaped investment outcomes. The study recommends stronger central-local coordination, post-investment facilitation, and investment diversification toward green and technology-intensive industries.

Keywords: *economic diplomacy; foreign direct investment; downstreaming; industrial sector; Indonesia.*

Abstrak

Penelitian ini menganalisis strategi diplomasi ekonomi Indonesia dalam meningkatkan daya tarik investasi asing di sektor industri selama pemulihan ekonomi tahun 2021–2024. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus deskriptif dan analisis dokumen. Data diperoleh dari laporan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Kementerian Luar Negeri, organisasi internasional, serta literatur ilmiah mutakhir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa diplomasi ekonomi dijalankan melalui forum multilateral, kerja sama ekonomi bilateral dan regional, promosi investasi, serta koordinasi antarlembaga. Realisasi investasi industri pengolahan meningkat dari Rp325,4 triliun pada 2021 menjadi Rp721,3 triliun pada 2024, sementara PMA mencapai Rp900,2 triliun pada 2024. Temuan ini menunjukkan bahwa diplomasi ekonomi mendukung pembentukan kepercayaan dan pembukaan peluang investasi, tetapi bukan satu-satunya penentu realisasi investasi. Hilirisasi, kepastian regulasi, infrastruktur, kesiapan lahan, dan kondisi ekonomi global turut menentukan hasilnya. Penelitian merekomendasikan penguatan koordinasi pusat-daerah, fasilitasi pascainvestasi, dan diversifikasi investasi menuju industri hijau serta berteknologi tinggi secara berkelanjutan pada masa depan.

Kata kunci: diplomasi ekonomi; investasi asing langsung; hilirisasi; sektor industri; Indonesia.

I. Pendahuluan

Pandemi COVID-19 telah mengubah arah pemulihan ekonomi global dan memperbesar urgensi kebijakan yang

mampu menjaga kesinambungan investasi produktif. Gangguan rantai pasok, perlambatan perdagangan internasional, perubahan pola konsumsi, serta ketidakpastian geopolitik membuat keputusan investasi lintas negara menjadi semakin selektif. Dalam konteks tersebut, investasi asing langsung atau *foreign direct investment* (FDI) tetap dipandang penting karena tidak hanya menyediakan modal, tetapi juga dapat membawa teknologi, jaringan produksi global, standar manajerial, dan akses pasar bagi negara penerima investasi. Akan tetapi, arus investasi global tidak berkembang dalam kondisi yang seragam. UN Trade and Development mencatat bahwa FDI global pada 2023 menurun 2% menjadi sekitar US\$1,3 triliun, antara lain akibat perlambatan ekonomi dan meningkatnya ketegangan geopolitik (United Nations Conference on Trade and Development [UNCTAD], 2024). Kondisi ini menunjukkan bahwa negara berkembang perlu mengombinasikan kebijakan domestik yang kredibel dengan strategi eksternal yang aktif untuk mempertahankan daya tarik investasinya.

Bagi Indonesia, pemulihan ekonomi pascapandemi tidak semata-mata berkaitan dengan pemulihan tingkat pertumbuhan, melainkan juga dengan transformasi struktur ekonomi menuju industri yang lebih bernilai tambah, produktif, dan terhubung dengan rantai nilai global. Sektor industri memiliki posisi strategis karena mampu menyerap tenaga kerja, menciptakan permintaan terhadap sektor pendukung, memperluas kapasitas ekspor, serta meningkatkan nilai tambah sumber daya domestik. Namun, daya saing industri tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan sumber daya alam dan besarnya pasar domestik. Investor juga mempertimbangkan kepastian hukum, konsistensi regulasi, kualitas infrastruktur, kemampuan tenaga kerja, biaya logistik, akses terhadap pasar ekspor, stabilitas makroekonomi, dan kemudahan berusaha. Oleh sebab itu, peningkatan investasi di sektor industri membutuhkan kebijakan yang bersifat lintas sektor dan tidak dapat hanya bertumpu pada promosi investasi semata.

Perkembangan ekonomi Indonesia menunjukkan bahwa investasi tetap menjadi salah satu penopang pemulihan. Bank Dunia mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap relatif tangguh pada 2024, dengan investasi yang terkait aktivitas hilirisasi, konstruksi, transportasi, pergudangan, dan komunikasi turut menyumbang terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun, kinerja manufaktur tidak sepenuhnya seragam: manufaktur berbasis komoditas mendapat dorongan dari hilirisasi, sementara beberapa sektor manufaktur yang berorientasi perdagangan menghadapi tekanan dan kehilangan pangsa pasar (World Bank, 2024). Temuan tersebut penting karena memperlihatkan bahwa peningkatan nilai investasi secara agregat belum tentu otomatis menggambarkan penguatan kapasitas industri secara merata. Karena itu, analisis FDI perlu diarahkan pada sektor, subsektor, asal negara investor, bentuk investasi, dan kaitannya dengan agenda transformasi industri nasional.

Data resmi juga menunjukkan pentingnya modal asing dalam struktur investasi Indonesia. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal melaporkan realisasi investasi tahun 2024 mencapai Rp1.714,2 triliun. Dari nilai tersebut, penanaman modal asing (PMA) mencapai Rp900,2 triliun atau 52,5% dari total realisasi investasi (Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, 2025). Angka tersebut menunjukkan bahwa investor asing masih berperan besar dalam pembiayaan proyek produktif di Indonesia. Meski demikian, penilaian terhadap keberhasilan kebijakan investasi tidak cukup berhenti pada total realisasi investasi. Perlu ditelaah lebih lanjut apakah investasi tersebut memperkuat kapasitas industri, mendorong alih teknologi, menciptakan keterkaitan dengan usaha domestik, meningkatkan kualitas pekerjaan, dan mendukung diversifikasi ekonomi secara berkelanjutan.

Dalam lingkungan persaingan regional, Indonesia berhadapan dengan negara-negara ASEAN yang juga berupaya menarik relokasi industri, proyek energi bersih, manufaktur kendaraan listrik, ekonomi digital, dan investasi berbasis teknologi. ASEAN Investment Report 2024 menunjukkan bahwa manufaktur merupakan salah satu pendorong utama pertumbuhan FDI di kawasan ASEAN. Investasi manufaktur di kawasan tersebut bahkan mencapai tingkat tertinggi pada 2022, didorong oleh restrukturisasi rantai pasok global, penguatan basis industri, serta kebijakan nasional dan regional yang mendukung investasi (ASEAN Secretariat & UNCTAD, 2024). Situasi tersebut menciptakan peluang bagi Indonesia, tetapi pada saat yang sama mempertegas kompetisi dalam menarik proyek investasi bernilai tambah. Indonesia tidak hanya bersaing dalam hal upah atau

insentif fiskal, melainkan juga dalam kepastian kebijakan, kecepatan perizinan, kualitas fasilitas industri, keterhubungan logistik, dan kemampuan menjamin keberlanjutan investasi.

Dalam kondisi demikian, diplomasi ekonomi menjadi instrumen yang relevan untuk mendukung agenda investasi nasional. Diplomasi ekonomi dapat dipahami sebagai pemanfaatan perangkat kebijakan luar negeri, jaringan diplomatik, forum internasional, perundingan ekonomi, dan promosi luar negeri untuk memperjuangkan kepentingan ekonomi nasional. Dalam konteks investasi, diplomasi ekonomi tidak berhenti pada kegiatan promosi atau penyelenggaraan forum bisnis. Diplomasi ekonomi juga mencakup upaya membangun kepercayaan investor, menyampaikan arah kebijakan nasional secara konsisten, mengidentifikasi calon investor strategis, memfasilitasi penyelesaian hambatan investasi, serta menghubungkan kebutuhan industri domestik dengan jaringan produksi internasional. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menempatkan investasi sebagai salah satu dimensi penting dalam Indeks Diplomasi Ekonomi, bersama perdagangan, pariwisata, dan ketenagakerjaan (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2024). Hal ini menegaskan bahwa investasi telah menjadi bagian dari agenda prioritas diplomasi Indonesia.

Pada periode 2021–2024, diplomasi ekonomi Indonesia dijalankan melalui sejumlah saluran. Pertama, Indonesia memanfaatkan forum multilateral, terutama Presidensi G20 tahun 2022, untuk memperkuat citra Indonesia sebagai negara yang aktif mendorong pemulihan ekonomi, transisi energi, transformasi digital, dan kerja sama pembangunan yang inklusif. Kedua, Indonesia melanjutkan penguatan kerja sama ekonomi bilateral dan regional melalui berbagai perjanjian perdagangan serta kemitraan ekonomi komprehensif. Ketiga, perwakilan diplomatik Indonesia dan kantor promosi investasi di luar negeri berperan dalam menyampaikan peluang investasi, menghubungkan investor dengan pemangku kepentingan domestik, dan mendukung fasilitasi proyek strategis. Keempat, diplomasi ekonomi tersebut berjalan bersamaan dengan kebijakan domestik seperti hilirisasi mineral, pembangunan kawasan industri, pengembangan kawasan ekonomi khusus, penyederhanaan perizinan, dan pembangunan infrastruktur.

Namun, hubungan antara diplomasi ekonomi dan peningkatan FDI tidak dapat diasumsikan bersifat otomatis. Keberhasilan promosi investasi di luar negeri sangat bergantung pada kemampuan institusi domestik dalam menerjemahkan komitmen atau minat investor menjadi realisasi proyek. Investor memerlukan informasi yang jelas, kepastian prosedur, penyelesaian hambatan lahan dan perizinan, infrastruktur yang memadai, serta konsistensi antara kebijakan pemerintah pusat dan daerah. OECD menilai Indonesia masih memiliki ruang untuk memperkuat keterbukaan perdagangan dan investasi, termasuk dengan mengurangi hambatan yang tidak diperlukan terhadap perdagangan barang, bahan baku, dan produk akhir (Organisation for Economic Co-operation and Development [OECD], 2024). Dengan demikian, diplomasi ekonomi yang efektif harus dipahami sebagai proses yang menghubungkan negosiasi dan promosi eksternal dengan reformasi serta fasilitasi investasi di dalam negeri.

Kebijakan hilirisasi menjadi salah satu konteks utama dalam pembahasan investasi industri Indonesia. Melalui hilirisasi, pemerintah berupaya meningkatkan nilai tambah sumber daya alam, mengembangkan industri pengolahan, dan memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global. Kebijakan ini membuka peluang bagi investasi pada industri pengolahan mineral, bahan baku baterai, kendaraan listrik, petrokimia, dan sektor industri pendukung lainnya. Meski begitu, hilirisasi juga menghadirkan tantangan, antara lain kebutuhan infrastruktur energi dan logistik, kepastian pasokan bahan baku, standar lingkungan, kesiapan tenaga kerja, dan kemampuan memperluas keterkaitan dengan industri lokal. Karena itu, diplomasi ekonomi perlu diarahkan bukan hanya untuk memperoleh investasi dalam jumlah besar, tetapi juga untuk menarik investor yang mendukung transfer teknologi, peningkatan kapasitas produksi, pengembangan pemasok domestik, dan agenda industri hijau.

Selain faktor domestik, dinamika eksternal juga memengaruhi strategi investasi Indonesia. Ketidakpastian geopolitik, perubahan kebijakan perdagangan negara besar, volatilitas harga komoditas, kenaikan biaya pembiayaan global, dan kecenderungan diversifikasi rantai pasok membuat investor menilai risiko secara lebih ketat. UNCTAD (2024) menekankan bahwa fasilitasi investasi dan tata kelola digital semakin penting untuk

menciptakan lingkungan investasi yang transparan dan efisien. Dalam konteks Indonesia, aspek ini relevan karena investor tidak hanya mempertimbangkan peluang ekonomi, tetapi juga pengalaman mereka dalam memperoleh informasi, mengurus perizinan, mematuhi regulasi, serta menyelesaikan kendala administratif. Dengan kata lain, kualitas tata kelola investasi menjadi bagian penting dari kredibilitas diplomasi ekonomi.

Sejauh ini, pembahasan mengenai investasi asing di Indonesia sering menekankan faktor ekonomi domestik, seperti ukuran pasar, pertumbuhan ekonomi, upah, infrastruktur, regulasi, dan insentif investasi. Di sisi lain, kajian mengenai diplomasi ekonomi cenderung berfokus pada aktivitas promosi, forum internasional, atau hubungan bilateral tertentu. Masih diperlukan kajian yang menghubungkan kedua dimensi tersebut secara lebih sistematis, khususnya untuk menjelaskan bagaimana diplomasi ekonomi Indonesia berinteraksi dengan kebijakan domestik dalam meningkatkan daya tarik investasi asing di sektor industri selama periode pemulihan ekonomi 2021–2024. Kesenjangan tersebut penting dikaji karena keberhasilan menarik FDI tidak hanya bergantung pada kegiatan diplomatik, tetapi juga pada kesesuaian antara pesan yang disampaikan kepada investor dengan kondisi nyata yang mereka hadapi ketika menjalankan investasi di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan perspektif diplomasi ekonomi dan paradigma *Ownership, Location, Internalization* (OLI) sebagai kerangka untuk membaca hubungan antara strategi eksternal dan daya tarik investasi Indonesia. Perspektif diplomasi ekonomi digunakan untuk mengidentifikasi aktor, instrumen, forum, dan bentuk kerja sama yang digunakan pemerintah dalam mendukung promosi investasi. Sementara itu, paradigma OLI digunakan untuk memahami faktor-faktor yang memengaruhi keputusan investor, terutama keunggulan lokasi Indonesia yang berkaitan dengan sumber daya, pasar, kebijakan hilirisasi, kawasan industri, infrastruktur, dan kepastian regulasi. Penggunaan kedua perspektif ini diharapkan dapat menghasilkan analisis yang tidak hanya menjelaskan kegiatan diplomasi, tetapi juga menilai keterkaitannya dengan kondisi investasi pada sektor industri.

Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah penelitian ini adalah: bagaimana strategi diplomasi ekonomi Indonesia dalam meningkatkan daya tarik investasi asing di sektor industri pada masa pemulihan ekonomi 2021–2024, serta faktor domestik dan eksternal apa yang memengaruhi efektivitas strategi tersebut? Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis instrumen diplomasi ekonomi Indonesia, mengidentifikasi keterhubungannya dengan kebijakan investasi dan hilirisasi domestik, serta menjelaskan hambatan yang memengaruhi realisasi investasi asing di sektor industri. Secara akademik, penelitian ini diharapkan memperkaya kajian Hubungan Internasional mengenai diplomasi ekonomi dan FDI. Secara praktis, penelitian ini diharapkan memberi masukan bagi penguatan koordinasi antara Kementerian Luar Negeri, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, kementerian teknis, pemerintah daerah, serta pelaku industri agar promosi investasi di luar negeri selaras dengan kesiapan implementasi kebijakan di dalam negeri.

II. Metode Penelitian

2.1 Desain dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus deskriptif. Pendekatan tersebut dipilih karena penelitian berfokus pada pemahaman mendalam mengenai strategi diplomasi ekonomi Indonesia dalam meningkatkan daya tarik investasi asing di sektor industri pada masa pemulihan ekonomi 2021–2024. Fokus penelitian bukan untuk menguji hubungan kausal secara statistik antara diplomasi ekonomi dan nilai investasi, melainkan untuk menjelaskan instrumen diplomasi yang digunakan, aktor yang terlibat, keterkaitan antara kebijakan luar negeri dan kebijakan domestik, serta kondisi yang mendukung atau menghambat realisasi investasi asing.

Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti menafsirkan kebijakan, dokumen, pernyataan resmi, data investasi, dan perkembangan kerja sama ekonomi secara kontekstual. Creswell dan Poth (2024) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif sesuai digunakan ketika peneliti ingin memahami makna, proses, serta kompleksitas

suatu fenomena sosial melalui berbagai sumber data. Dalam penelitian ini, fenomena yang dianalisis adalah diplomasi ekonomi Indonesia sebagai proses kebijakan yang menghubungkan kegiatan eksternal—seperti promosi investasi, perundingan kerja sama ekonomi, dan partisipasi dalam forum internasional—dengan kebijakan domestik, seperti hilirisasi, reformasi regulasi, pengembangan kawasan industri, dan fasilitasi investasi.

Studi kasus dipusatkan pada Indonesia selama periode 2021–2024. Rentang waktu tersebut dipilih karena mencakup fase pemulihan ekonomi pascapandemi, pelaksanaan Presidensi G20 Indonesia pada 2022, penguatan agenda hilirisasi, serta perkembangan realisasi investasi hingga akhir 2024. Untuk melengkapi data tahunan 2024, penelitian menggunakan publikasi resmi yang diterbitkan pada 2025, sepanjang publikasi tersebut melaporkan kondisi atau realisasi investasi pada tahun 2024.

2.2 Fokus, Unit Analisis, dan Batasan Penelitian

Fokus penelitian adalah strategi diplomasi ekonomi Indonesia yang diarahkan untuk mendukung peningkatan daya tarik investasi asing di sektor industri. Unit analisis penelitian ini adalah kebijakan, instrumen, dan tindakan diplomasi ekonomi pemerintah Indonesia. Unit tersebut dianalisis melalui tiga dimensi utama.

Pertama, dimensi instrumen diplomasi ekonomi, yang mencakup promosi investasi, forum bisnis, diplomasi bilateral, diplomasi multilateral, perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif (*Comprehensive Economic Partnership Agreement/CEPA*), dan kegiatan perwakilan Indonesia di luar negeri. Kedua, dimensi aktor dan koordinasi kelembagaan, yang mencakup Kementerian Luar Negeri, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, kementerian teknis terkait, pemerintah daerah, perwakilan diplomatik, serta pihak swasta yang relevan. Ketiga, dimensi kondisi investasi sektor industri, yang mencakup kebijakan hilirisasi, kawasan industri, kepastian regulasi, kemudahan perizinan, infrastruktur, serta risiko eksternal seperti ketidakpastian geopolitik dan persaingan investasi di ASEAN.

Penelitian dibatasi pada investasi asing di sektor industri, terutama industri pengolahan dan industri yang terkait dengan agenda hilirisasi. Penelitian tidak membahas seluruh sektor PMA secara menyeluruh, seperti jasa keuangan, perbankan, migas hulu, atau investasi portofolio. Pembatasan ini diperlukan agar analisis tetap selaras dengan tujuan penelitian, yaitu menjelaskan keterkaitan diplomasi ekonomi dengan penguatan industri nasional.

2.3 Jenis dan Sumber Data

Penelitian menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui studi dokumen. Data sekunder dipilih karena objek penelitian berupa kebijakan publik, strategi diplomasi, laporan investasi, dan dokumen kerja sama ekonomi yang tersedia secara resmi. Analisis dokumen memungkinkan peneliti menelaah isi kebijakan secara sistematis sekaligus membandingkan informasi dari lembaga yang berbeda (Prior, 2021).

Sumber data dibagi menjadi tiga kelompok. Pertama, **dokumen primer resmi**, yang meliputi laporan realisasi investasi dari Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, dokumen kebijakan dan publikasi Kementerian Luar Negeri, siaran pers pemerintah, dokumen perjanjian ekonomi, serta publikasi kementerian atau lembaga teknis terkait. Laporan realisasi investasi BKPM digunakan untuk mengidentifikasi perkembangan PMA, sektor penerima investasi, nilai realisasi, dan kecenderungan investasi selama 2021–2024.

Kedua, **dokumen organisasi internasional**, seperti *World Investment Report* dari UNCTAD, *Indonesia Economic Prospects* dari Bank Dunia, laporan OECD, dan *ASEAN Investment Report*. Dokumen tersebut digunakan untuk memahami konteks global dan regional, termasuk tren FDI, perubahan rantai pasok, kompetisi investasi antarnegara ASEAN, serta risiko ekonomi dan geopolitik. UNCTAD (2024) menekankan pentingnya fasilitasi investasi dan tata kelola digital dalam menciptakan lingkungan investasi yang lebih transparan, sedangkan ASEAN Sekretariat dan UNCTAD (2024) menunjukkan pentingnya manufaktur dalam dinamika FDI di kawasan ASEAN.

Ketiga, **literatur ilmiah terbaru**, berupa artikel jurnal, buku akademik, dan publikasi ilmiah yang relevan dengan diplomasi ekonomi, promosi investasi, kebijakan industri, dan FDI. Literatur ilmiah digunakan untuk memperkuat landasan konseptual serta membandingkan temuan penelitian dengan studi terdahulu.

Dokumen dipilih dengan kriteria sebagai berikut:

1. Diterbitkan atau memuat data yang relevan dengan periode 2021–2024.
2. Berasal dari lembaga resmi, organisasi internasional, atau penerbit akademik yang kredibel.
3. Memuat informasi mengenai diplomasi ekonomi, kebijakan investasi, FDI, sektor industri, hilirisasi, CEPA, atau fasilitasi investasi.
4. Menyediakan informasi yang dapat ditelusuri mengenai waktu penerbitan, lembaga penerbit, dan substansi dokumen.
5. Tidak bersifat opini pribadi atau promosi yang tidak didukung data dan dokumen resmi.

2.4 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui empat tahap. Pertama, peneliti mengidentifikasi dokumen berdasarkan kata kunci, antara lain “diplomasi ekonomi Indonesia”, “investasi asing”, “PMA”, “sektor industri”, “hilirisasi”, “kawasan industri”, “CEPA”, dan “promosi investasi”. Kedua, dokumen yang ditemukan diseleksi berdasarkan kriteria relevansi, kredibilitas lembaga penerbit, dan kesesuaian periode penelitian. Ketiga, dokumen terpilih diklasifikasikan ke dalam kelompok kebijakan diplomasi, data investasi, kebijakan industri, dan konteks eksternal. Keempat, peneliti menyusun matriks data yang memuat sumber dokumen, tahun, aktor, instrumen kebijakan, sektor terkait, temuan utama, serta keterkaitannya dengan pertanyaan penelitian.

Matriks data digunakan untuk mencegah pengulangan informasi dan memastikan setiap klaim analitis dapat ditelusuri pada sumbernya. Sebagai contoh, data mengenai realisasi PMA digunakan untuk menggambarkan perkembangan investasi, sedangkan dokumen diplomasi ekonomi digunakan untuk menjelaskan strategi pemerintah. Dengan demikian, angka investasi tidak langsung diperlakukan sebagai bukti tunggal keberhasilan diplomasi, tetapi dianalisis bersama kebijakan domestik, kondisi global, dan faktor kelembagaan lain.

2.5 Teknik Analisis Data

Data dianalisis menggunakan analisis isi kualitatif (*qualitative content analysis*) secara terarah. Analisis terarah digunakan karena penelitian telah memiliki kategori awal berdasarkan konsep diplomasi ekonomi dan paradigma *Ownership, Location, Internalization* (OLI). Kategori awal tersebut tetap terbuka untuk dikembangkan apabila ditemukan tema baru dari dokumen yang dianalisis.

Tahap analisis dilakukan sebagai berikut:

1. Reduksi data, yaitu memilih informasi yang relevan dengan strategi diplomasi ekonomi dan investasi asing di sektor industri.
2. Pengodean awal, yaitu memberi kode pada data berdasarkan kategori: instrumen diplomasi, aktor, kerja sama ekonomi, promosi investasi, kebijakan hilirisasi, kawasan industri, regulasi, tantangan eksternal, dan hasil investasi.
3. Kategorisasi, yaitu mengelompokkan kode menjadi tema analitis yang lebih luas, seperti diplomasi multilateral, diplomasi bilateral, fasilitasi investasi, penguatan keunggulan lokasi, serta hambatan implementasi.
4. Interpretasi, yaitu menjelaskan hubungan antara kegiatan diplomasi ekonomi dan faktor domestik yang memengaruhi daya tarik investasi.

5. Penarikan kesimpulan, yaitu merumuskan pola strategi, capaian, keterbatasan, dan rekomendasi kebijakan berdasarkan temuan yang telah diverifikasi.

Dalam penggunaan paradigma OLI, penelitian ini menempatkan unsur *Location* sebagai fokus utama karena penelitian membahas daya tarik Indonesia sebagai lokasi investasi. Namun, unsur *Ownership* dan *Internalization* tetap digunakan secara terbatas untuk menjelaskan karakter investor, kebutuhan teknologi, pertimbangan penguasaan rantai nilai, dan alasan perusahaan asing memilih melakukan investasi langsung dibandingkan bentuk kerja sama ekonomi lainnya.

2.6 Uji Kredibilitas Data

Kredibilitas data dijaga melalui triangulasi sumber. Informasi mengenai suatu kebijakan atau realisasi investasi dibandingkan antara dokumen pemerintah, laporan organisasi internasional, dan literatur ilmiah. Sebagai contoh, data investasi dari BKPM dibandingkan dengan pembacaan Bank Dunia, OECD, UNCTAD, dan ASEAN mengenai kondisi ekonomi, manufaktur, serta tren investasi regional. Triangulasi diperlukan agar kesimpulan penelitian tidak hanya mengandalkan narasi satu lembaga.

Selain itu, penelitian menerapkan audit trail sederhana melalui pencatatan sumber, tanggal akses, kriteria seleksi, dan alasan penggunaan setiap dokumen. Peneliti juga membedakan secara tegas antara komitmen investasi, minat investasi, dan realisasi investasi. Perbedaan ini penting agar penelitian tidak menyamakan pengumuman kerja sama atau nilai komitmen dengan investasi yang telah benar-benar direalisasikan.

III. Hasil Penelitian dan Pembahasan

3.1 Perkembangan Realisasi Investasi pada Sektor Industri, 2021–2024

Hasil penelusuran dokumen menunjukkan bahwa periode pemulihan ekonomi 2021–2024 ditandai oleh peningkatan realisasi investasi nasional dan menguatnya posisi sektor industri pengolahan. Data Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM memperlihatkan bahwa nilai realisasi investasi nasional meningkat dari Rp901,02 triliun pada 2021 menjadi Rp1.714,2 triliun pada 2024. Pada periode yang sama, nilai realisasi investasi sektor industri pengolahan—gabungan PMA dan PMDN—meningkat dari Rp325,4 triliun menjadi Rp721,3 triliun.

Tahun	Realisasi nasional (Rp triliun)	investasi Realisasi pengolahan (Rp triliun)	investasi industri	Keterangan
2021	901,02	325,4		Fase awal pemulihan ekonomi pascapandemi
2022	1.207,2	497,7		Penguatan hilirisasi dan pemulihan kegiatan industri
2023	1.418,9	596,3		Industri pengolahan tetap menjadi sektor utama investasi
2024	1.714,2	721,3		PMA mencapai Rp900,2 triliun atau 52,5% dari total investasi

Sumber: Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM (2025).

Kenaikan tersebut menunjukkan bahwa sektor industri pengolahan tetap menjadi salah satu tujuan utama investasi selama masa pemulihan. Namun, data tersebut harus dibaca secara hati-hati. Nilai industri pengolahan dalam tabel mencakup PMA dan PMDN, sehingga tidak dapat langsung digunakan untuk menyimpulkan bahwa seluruh kenaikan investasi industri merupakan dampak dari diplomasi ekonomi atau berasal dari investor asing. Data itu lebih tepat dipahami sebagai indikator meningkatnya daya tarik industri Indonesia yang dipengaruhi oleh kombinasi kebijakan promosi investasi, hilirisasi, kondisi pasar, infrastruktur, dan reformasi regulasi.

Pada 2021, investasi masih berlangsung dalam situasi pemulihan dari gangguan pandemi. Meski demikian, sektor industri logam dasar, barang logam, bukan mesin, dan peralatan telah menjadi sektor investasi terbesar dengan nilai Rp117,5 triliun. Posisi ini mengindikasikan kuatnya minat investasi pada industri berbasis sumber daya alam dan pengolahan mineral (Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, 2022). Pada 2022, peran industri pengolahan semakin terlihat, terutama melalui investasi pada industri logam dasar, pengolahan nikel, dan industri besi-baja. Pada triwulan I 2022 saja, sektor industri secara keseluruhan menyumbang US\$5,4 miliar atau 52,9% dari total PMA, dengan industri logam dasar sebagai kontributor terbesar (Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, 2022).

Tren tersebut berlanjut pada 2023. Pada triwulan I 2023, sektor industri pengolahan berkontribusi 42,5% terhadap total realisasi investasi, sementara industri logam dasar, barang logam, bukan mesin, dan peralatan menempati posisi pertama dengan investasi Rp46,7 triliun (Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, 2023). Perkembangan ini menunjukkan bahwa sektor industri, khususnya yang berkaitan dengan hilirisasi, menjadi salah satu basis utama pemulihan investasi Indonesia. Namun, konsentrasi investasi pada industri berbasis komoditas juga memperlihatkan perlunya diversifikasi investasi menuju subsektor manufaktur berteknologi menengah dan tinggi.

Pada 2024, realisasi investasi nasional mencapai Rp1.714,2 triliun atau tumbuh 20,8% dibandingkan tahun sebelumnya. PMA menyumbang Rp900,2 triliun atau 52,5% dari total investasi, sedangkan PMDN mencapai Rp814 triliun atau 47,5% (Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, 2025). Industri pengolahan mencatat realisasi Rp721,3 triliun. Meskipun belum mencapai target sektor industri pengolahan sebesar Rp782 triliun, nilai tersebut tetap menunjukkan peningkatan dibandingkan 2023 dan menempatkan industri pengolahan sebagai sektor yang strategis dalam struktur investasi nasional (Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, 2025).

3.2 Diplomasi Ekonomi sebagai Instrumen Pendukung Investasi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa diplomasi ekonomi Indonesia selama 2021–2024 dijalankan melalui tiga instrumen utama, yaitu diplomasi multilateral, diplomasi bilateral dan regional, serta promosi investasi oleh aktor pemerintah. Pertama, Indonesia memanfaatkan forum multilateral untuk menguatkan citra sebagai negara tujuan investasi yang stabil dan memiliki agenda transformasi ekonomi. Presidensi G20 Indonesia pada 2022 menjadi momentum untuk menempatkan isu pemulihan ekonomi, transformasi digital, transisi energi, dan pembangunan berkelanjutan dalam agenda internasional. Dalam konteks investasi, forum tersebut berfungsi terutama sebagai sarana membangun kepercayaan, memperluas jejaring dengan calon investor, dan memperkenalkan prioritas pembangunan Indonesia.

Namun, hasil penelitian memperlihatkan bahwa forum multilateral tidak dapat diposisikan sebagai penyebab tunggal peningkatan PMA. Forum seperti G20 lebih tepat dipahami sebagai instrumen pembentuk reputasi dan kepercayaan investor. Realisasi investasi tetap bergantung pada tindak lanjut domestik, antara lain ketersediaan proyek, kepastian regulasi, kesiapan lahan, infrastruktur, serta koordinasi antarlembaga. Dengan demikian, pengaruh diplomasi multilateral bersifat tidak langsung, yaitu melalui peningkatan visibilitas Indonesia dan penguatan persepsi mengenai peluang investasi.

Kedua, diplomasi bilateral dan regional dijalankan melalui penguatan kerja sama ekonomi, termasuk perundingan dan pelaksanaan CEPA. Kerja sama tersebut berpotensi meningkatkan kepastian hubungan ekonomi, memperluas akses pasar, dan menciptakan ruang dialog mengenai investasi, standar produk, serta kerja sama industri. Dalam konteks sektor industri, CEPA penting karena investor tidak hanya mempertimbangkan pasar domestik Indonesia, tetapi juga akses terhadap pasar kawasan dan peluang integrasi dengan rantai nilai global. Meski demikian, manfaat CEPA terhadap investasi tidak bersifat otomatis. Efektivitasnya bergantung pada implementasi ketentuan perjanjian, harmonisasi regulasi, kemampuan industri domestik memenuhi standar, dan ketersediaan layanan fasilitasi investasi.

Ketiga, diplomasi ekonomi dijalankan melalui promosi investasi dan fasilitasi oleh Kementerian Investasi dan

Hilirisasi/BKPM, Kementerian Luar Negeri, serta perwakilan Indonesia di luar negeri. Peran aktor-aktor tersebut mencakup penyebaran informasi investasi, pertemuan bisnis, penghubungan investor dengan proyek prioritas, dan fasilitasi komunikasi antara investor dengan instansi domestik. Dalam Indeks Diplomasi Ekonomi 2024, investasi ditempatkan sebagai salah satu aspek penting diplomasi ekonomi Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan diplomasi tidak hanya berorientasi pada perdagangan, tetapi juga pada penciptaan peluang investasi dan penguatan daya saing ekonomi nasional (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2024).

3.3 Hilirisasi dan Keunggulan Lokasi Indonesia

Temuan berikutnya menunjukkan bahwa kebijakan hilirisasi menjadi faktor domestik yang paling menonjol dalam mendukung daya tarik investasi industri. Kebijakan ini diarahkan untuk mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan mentah dan meningkatkan nilai tambah melalui pengolahan di dalam negeri. Dampak kebijakan tersebut terlihat pada tingginya investasi industri logam dasar, khususnya yang berkaitan dengan pengolahan nikel, besi, baja, dan pengembangan rantai pasok kendaraan listrik.

Dalam perspektif OLI, kebijakan hilirisasi memperkuat aspek *location advantage* Indonesia. Keunggulan lokasi Indonesia tidak hanya berasal dari sumber daya mineral dan pasar domestik yang besar, tetapi juga dari upaya pemerintah menciptakan ekosistem industri melalui kawasan industri, kawasan ekonomi khusus, pembangunan infrastruktur, dan pengembangan rantai pasok. Bank Dunia mencatat bahwa aktivitas hilirisasi di sektor pertambangan dan pembangunan infrastruktur terkait transportasi, pergudangan, serta komunikasi turut mendukung pertumbuhan investasi pada 2024 (World Bank, 2024).

Meskipun demikian, kualitas keunggulan lokasi Indonesia masih menghadapi variasi antarwilayah dan antarsektor. Ketersediaan infrastruktur, kesiapan tenaga kerja, kepastian tata ruang, akses energi, serta koordinasi perizinan belum selalu sama di setiap daerah. Oleh sebab itu, promosi investasi di luar negeri perlu disertai informasi proyek yang realistis, kesiapan lokasi, dan mekanisme penyelesaian hambatan investasi. Investor tidak hanya membutuhkan informasi tentang insentif atau potensi pasar, tetapi juga kepastian bahwa proyek dapat dijalankan secara efektif setelah keputusan investasi dibuat.

3.4 Tantangan terhadap Efektivitas Diplomasi Ekonomi

Hasil penelitian menunjukkan adanya empat tantangan utama. Pertama, ketidakpastian global, termasuk perlambatan ekonomi, konflik geopolitik, perubahan kebijakan perdagangan, dan volatilitas harga komoditas. UNCTAD (2024) mencatat bahwa ketegangan geopolitik dan perlambatan ekonomi global menjadi faktor yang menekan arus FDI dunia. Situasi tersebut membuat persaingan antarnegara untuk memperoleh investasi semakin ketat.

Kedua, investasi Indonesia masih terkonsentrasi pada industri berbasis sumber daya alam. Konsentrasi tersebut memberi manfaat berupa percepatan hilirisasi, tetapi juga menimbulkan risiko ketergantungan pada harga komoditas dan keterbatasan diversifikasi industri. Oleh karena itu, diplomasi ekonomi perlu diperluas untuk menarik investasi pada industri farmasi, elektronik, komponen kendaraan listrik, teknologi digital, energi terbarukan, dan industri hijau.

Ketiga, terdapat kesenjangan antara promosi investasi dan kesiapan implementasi di tingkat domestik. Komitmen investasi, nota kesepahaman, atau pernyataan minat investor tidak selalu berubah menjadi realisasi investasi. Faktor seperti perizinan, lahan, infrastruktur, kepastian pasokan energi, dan koordinasi pemerintah pusat-daerah menentukan keberhasilan tindak lanjut diplomasi ekonomi.

Keempat, Indonesia menghadapi kompetisi kuat dari negara ASEAN. ASEAN Investment Report 2024 menunjukkan bahwa manufaktur tetap menjadi sektor penting dalam persaingan FDI kawasan. Karena itu, Indonesia perlu memperkuat keunggulan yang tidak hanya berbasis sumber daya alam, tetapi juga kualitas regulasi, kapasitas inovasi, keterampilan tenaga kerja, dan integrasi industri domestik dengan rantai nilai regional (ASEAN Secretariat & UNCTAD, 2024).

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa diplomasi ekonomi Indonesia berperan sebagai instrumen pendukung dalam membangun kepercayaan dan membuka peluang investasi asing pada sektor industri. Akan tetapi, peningkatan realisasi investasi 2021–2024 tidak dapat dijelaskan oleh diplomasi ekonomi semata. Keberhasilan tersebut merupakan hasil interaksi antara diplomasi eksternal, kebijakan hilirisasi, perbaikan iklim investasi, kondisi pasar, dan perubahan strategi investor global.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa diplomasi ekonomi Indonesia pada periode 2021–2024 berperan sebagai instrumen pendukung dalam memperkuat daya tarik investasi asing di sektor industri. Peran tersebut dijalankan melalui pemanfaatan forum multilateral, penguatan kerja sama ekonomi bilateral dan regional, promosi investasi oleh perwakilan Indonesia di luar negeri, serta koordinasi antara Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM. Diplomasi ekonomi membantu membangun kepercayaan investor, memperkenalkan peluang investasi, dan memperluas jaringan kerja sama ekonomi Indonesia.

Peningkatan realisasi investasi nasional dan industri pengolahan selama periode penelitian menunjukkan adanya penguatan minat investasi. Nilai realisasi investasi industri pengolahan meningkat dari Rp325,4 triliun pada 2021 menjadi Rp721,3 triliun pada 2024. Namun, peningkatan tersebut tidak dapat dijelaskan hanya oleh diplomasi ekonomi. Realisasi investasi juga dipengaruhi oleh kebijakan hilirisasi, potensi sumber daya alam, pasar domestik, pembangunan kawasan industri, perbaikan infrastruktur, reformasi perizinan, serta perubahan strategi perusahaan global dalam mengatur rantai pasok.

Kebijakan hilirisasi menjadi faktor domestik yang paling menonjol dalam memperkuat keunggulan lokasi Indonesia. Investasi pada industri logam dasar, pengolahan nikel, besi-baja, dan rantai pasok kendaraan listrik menunjukkan bahwa Indonesia memiliki peluang besar untuk menarik investasi berbasis nilai tambah. Meski demikian, konsentrasi investasi pada industri berbasis komoditas masih menjadi tantangan. Indonesia perlu memperluas investasi ke sektor manufaktur berteknologi menengah dan tinggi, industri hijau, farmasi, elektronik, serta industri pendukung ekonomi digital.

Efektivitas diplomasi ekonomi juga masih dipengaruhi oleh hambatan domestik dan eksternal. Hambatan domestik mencakup ketidaksinkronan kebijakan pusat-daerah, persoalan lahan, kepastian regulasi, pasokan energi, kesiapan tenaga kerja, dan fasilitas logistik. Sementara itu, hambatan eksternal mencakup ketidakpastian geopolitik, perubahan kebijakan perdagangan negara besar, fluktuasi harga komoditas, dan persaingan investasi yang semakin kuat di kawasan ASEAN. Dengan demikian, diplomasi ekonomi akan lebih efektif apabila diikuti kesiapan proyek dan perbaikan iklim investasi di dalam negeri.

Saran

1. Pemerintah perlu memperkuat koordinasi antara Kementerian Luar Negeri, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, kementerian teknis, dan pemerintah daerah agar promosi investasi di luar negeri sejalan dengan kesiapan proyek di dalam negeri.
2. Promosi investasi sebaiknya diarahkan secara lebih selektif pada investor yang dapat mendukung transfer teknologi, pengembangan pemasok lokal, peningkatan keterampilan tenaga kerja, dan penguatan rantai nilai industri nasional.
3. Pemerintah perlu memperluas target diplomasi ekonomi ke sektor industri hijau, energi terbarukan, kendaraan listrik, elektronik, farmasi, dan industri digital agar investasi tidak terkonsentrasi pada industri berbasis komoditas.
4. Fasilitasi pascainvestasi perlu diperkuat. Investor yang telah masuk membutuhkan kepastian perizinan, akses lahan, energi, logistik, dan mekanisme penyelesaian hambatan yang cepat. Keberhasilan menjaga

investor yang telah beroperasi dapat meningkatkan reputasi Indonesia di mata calon investor lain.

5. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan data sektoral dan data asal negara investor secara lebih rinci, serta melakukan wawancara dengan pemerintah, pelaku usaha, dan investor asing. Pendekatan tersebut diperlukan untuk mengukur lebih jauh efektivitas masing-masing instrumen diplomasi ekonomi terhadap keputusan investasi.

Daftar Pustaka

- ASEAN Secretariat, & United Nations Conference on Trade and Development. (2024). *ASEAN investment report 2024: ASEAN Economic Community 2025 and foreign direct investment*. <https://asean.org/wp-content/uploads/2024/10/AIR2024-3.pdf>
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2024). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (5th ed.). SAGE Publications. <https://uk.sagepub.com/en-gb/asi/qualitative-inquiry-and-research-design/book266033>
- Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal. (2022, April 27). *Investasi Indonesia bergerak bangkit pasca pandemi, realisasi investasi triwulan I tahun 2022 mencapai Rp282,4 triliun*. <https://bkpm.go.id/id/info/siaran-pers/investasi-indonesia-bergerak-bangkit-pasca-pandemi-realisasi-investasi-triwulan-i-tahun-2022-mencapai-rp-282-4-triliun>
- Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal. (2023, April 28). *Realisasi investasi tumbuh 16,5%, Kementerian Investasi tunjukkan optimisme di 2023*. <https://bkpm.go.id/id/info/siaran-pers/realisasi-investasi-tumbuh-16-5-kementerian-investasi-tunjukkan-optimisme-di-2023>
- Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal. (2025). *Laporan kinerja Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM tahun 2024*. https://ppid.bkpm.go.id/wp-content/uploads/2025/03/LKj%20KEMENINVESTIL%202024%20%28GABUNG%29_ttd.pdf
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2024). *Indeks diplomasi ekonomi 2024*. https://perpustakaan.kemlu.go.id/index.php?id=7116&p=show_detail
- Organisation for Economic Co-operation and Development. (2024). *Indonesia: OECD economic outlook, volume 2024 issue 2*. <https://doi.org/10.1787/d8814e8b-en>
- Prior, L. (2021). *Doing document analysis: A practice-oriented method*. SAGE Publications. <https://uk.sagepub.com/en-gb/eur/doing-document-analysis/book276193>
- United Nations Conference on Trade and Development. (2024). *World investment report 2024: Investment facilitation and digital government*. <https://unctad.org/publication/world-investment-report-2024>
- World Bank. (2024). *Indonesia economic prospects: Funding Indonesia's vision 2045*. <https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/099121324112039917>